

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan proses pembangunan, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang tepat dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan, maka pemerintah daerah membentuk Perangkat Daerah yang bertujuan untuk membantu dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan daerah di bidang ekonomi maka terjadilah peningkatan permintaan dan indikator-indikator yang membutuhkan ketersediaan data perencanaan dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan adanya peningkatan permintaan ketersediaan data perencanaan tersebut, maka setiap Perangkat Daerah perlu mempertimbangkan kapasitas dan peran kelembangaan termasuk bagaimana bentuk perubahan yang diharapkan dapat direalisasikan melalui serangkaian program dan kegiatan yang langsung berkaitan dengan isu-isu strategis dan menyelesaikan masalah yang ada. Untuk menunjang perencanaan pembangunan yang lebih baik, maka setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun rencana kerja yang akan menjadi acuan dalam penentuan ide, gagasan dan strategi terhadap lingkungan organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa tahapan

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah disusun dengan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pelengkapannya. sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan perencanaan strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang sifatnya lebih operasional.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sumpeno (2012) bahwa Renja merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah yang dilengkapi dengan rencana yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka dari itu Renja Perangkat Daerah menjadi instrumen dan indikator penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah.

Sementara itu Sjafrizal (2017) menjelaskan secara detail isi Renja, dimana dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah juga diperlukan indikator dan target kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator dan target kinerja ini tidak hanya diperlukan untuk mewujudkan perencanaan yang terukur saja, tetapi juga diperlukan penyusunan *Rencana Kerja Anggaran (RKA)* sebagai

alat ukur dalam melakukan evaluasi perencanaan yang strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dalam waktu yang akan datang.

Dengan kedudukannya yang cukup strategis, maka proses penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun selanjutnya melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hal yang pertama dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, evaluasi atas capaian Renstra Perangkat Daerah, sampai pada pembahasan terhadap kondisi terkini yang sedang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas mengenai capaian target serta kondisi terkini dalam perumusan program dan kegiatan berikutnya.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah, Bappeda sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua arah termasuk *Good Governance* dan *Clean Government*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara maupun daerah yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/12/I/Ren-Makro/Bappeda-2019 perihal penyampaian rancangan awal Renja OPD Tahun 2020, maka dilakukanlah penyusunan Renja Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan datang. Didalam penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlukan adanya penyesuaian antara program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap Renja Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memfokuskan studi dengan melakukan kegiatan magang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dengan mengangkat judul “ **Prosedur Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka laporan tugas akhir yang berjudul Prosedur Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat akan dibatasi dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi?
2. Bagaimanakah Prosedur Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi ?
3. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam Proses Penyusunan dan Verifikasi Renja Perangkat Daerah Provinsi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Adapun tujuan magang yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan dalam Proses Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang ini antara lain :

- Bagi Penulis
 1. Menambah pengetahuan penulis mengenai Prosedur Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi, dan hambatan yang ditemukan dalam Proses Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan.
 2. Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan tangguh dalam menghadapi dunia kerja.
 3. Mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja yang sesungguhnya.
- Bagi Fakultas
 1. Memperkenalkan Program DIII Fakultas Ekonomi khususnya Keuangan Negara.
 2. Terjalinnya kerja sama atau hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Metode Perolehan Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan data dengan metode sebagai berikut :

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pegawai Bappeda terkait mengenai Prosedur Penyusunan dan Verifikasi Renja Perangkat Daerah Provinsi dan melakukan pengamatan langsung di Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah. Sedangkan Data Sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan, laporan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan laporan tugas akhir ini sebagai landasan teori. Data sekunder bertujuan untuk mendukung data primer dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan pokok dari perumusan masalah.

2. Metode Pengumpulan Data

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penulis mengadakan penelitian/pengamatan langsung di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan metode wawancara kepada pegawai terkait.

b. *Libary Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penulis mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas, guna menyempurnakan penulisan laporan tugas akhir.

3. Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah Analisa Deskriptif berupa pandangan, tinjauan, uraian, paparan dari penulis berkaitan dengan kondisi lapangan mengenai data dan fakta yang diperoleh.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja yang terhitung sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan 05 April 2019.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi yang tertera pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode perolehan data, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan apa saja teori yang bersangkutan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Bab III : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum ,visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, tugas pokok dan fungsi, struktur Bappeda, dan permasalahan utama yang sedang dihadapi Bappeda.

Bab IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Prosedur Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi, dan hambatan yang ditemukan dalam Proses Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan kajian dan kemudian dilengkapi dengan saran yang sifatnya membangun, yang berguna untuk perbaikan dan perubahan yang akan datang.

